

# Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Astrid<sup>1</sup>, Rahmida Erliyani<sup>2</sup>, Indah Ramadhany<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: Ananta.firadaus@ulm.ac.id

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: rahmidaerliyani@ulm.ac.id

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: indah.ramadhany@ulm.ac.id

**Abstract:** The purpose of conducting this research is to be able to find out about the criteria and requirements for sound recordings which can be valid evidence in the investigation of corruption cases. The type of research is using normative research and the nature of this research is descriptive. The results of this thesis research show that: First, the criteria for voice recording can be evidence or wiretapping obtained legally according to the law. The criteria for sound recordings may be used as evidence in trials of embezzlement cases. Only recordings/wiretapping carried out by the KPK can be used as evidence, while recordings or wiretaps carried out by ordinary people are only used as a basis for instructions to start an investigation. Sound recordings are used as evidence for instructions on the law enforcement process from recommendations from the prosecutor's office, the police, and other enforcement agencies. Second, the condition for voice recording can be evidence in a corruption case, namely that the voice recording is supported by other evidence. Voice recordings can be recognized for their position on the provisions of electronic evidence that they must use a legal system, not by secretly wiretapping without permission/illegal.

**Keywords:** Sound Recording Evidence; Electronic Evidence; Embezzlement Crime

**Abstrak:** Tujuan melakukan penelitian ini agar dapat mengetahui tentang kriteria dan syarat rekaman suara yang dapat menjadi alat bukti sah didalam penyidikan perkara Korupsi. Adapun jenis penelitiannya yaitu menggunakan penelitian normatif dan untuk sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif. Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, kriteria voice recording yang bisa menjadi bukti atau penyadapan yang didapatkan secara legal menurut UU. Kriteria rekaman suara boleh digunakan jadi alat bukti dalam persidangan perkara korupsi yang bisa digunakan menjadi alat bukti hanya rekaman/penyadapan yang dilakukan oleh KPK, sementara rekaman atau penyadapan dilakukan orang biasa hanyalah digunakan untuk dasar petunjuk dimulainya penyidikan. Rekaman suara digunakan sebagai bukti petunjuk pada proses penegakan hukum dari anjuran kejaksaan, kepolisian, dan juga lembaga penegak lainnya. Kedua, syarat voice recording bisa menjadi bukti dalam perkara korupsi yaitu rekaman suara tersebut didukung oleh alat bukti lain. Rekaman suara dapat diakui kedudukannya atas ketentuan bukti elektronik wajib menggunakan system legal, tidak dengan cara diam-diam melakukan penyadapan tanpa ijin/illegal.

**Kata Kunci:** Alat Bukti Rekaman Suara; Alat Bukti Elektronik; Tindak Pidana Korupsi

## 1. Pendahuluan

Di era sekarang perkembangan teknologi sudah sangat berkembang pesat, sehingga hampir di segala aktivitas keseharian manusia tidak lepas dari yang namanya teknologi. Dalam menyelesaikan masalah yang ada saat ini teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan agar dapat membantu memudahkan segala aktivitas dalam kehidupan manusia.

Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang sering dipakai dalam pembuktian di pengadilan adalah rekaman suara.

Dikarenakan kejahatan yang semakin berkembang pada era ini maka diperlukannya pembuktian yang juga harus mengikuti perkembangan untuk mempermudah mengatasi kejahatan yaitu salah satu contohnya ialah pembuktian berupa informasi elektronik.

Pembuktian dapat dikatakan menjadi tahapan yang paling penting dalam menentukan proses peradilan pidana yang dikarenakan pada tahap pembuktian itu akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Alat bukti yang sah selain yang diatur di dalam KUHAP, Khususnya tindak pidana korupsi juga diatur didalam ketentuan pasal 26A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di huruf (a) dan (b).

Penyadapan diperbolehkan apabila diamanatkan oleh UU. Seperti yang ditentukan dalam pasal 31 ayat (3) ITE yang menyatakan penyadapan atau intersepsi boleh dilaksanakan untuk penegakan hukum berdasarkan undang-undang yang sudah ditentukan.

Dalam hal penyadapan dalam kasus perkara korupsi, ada beberapa mekanisme pemberian izin penyadapan yaitu :

1. Penyidik mengajukan permohonan izin penyadapan ke Dewan Pengawas melalui Kepala Sekretariat Dewan Pengawas.
2. Harus ada surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan, nomor telpon yang akan disadap, uraian singkat mengenai perkara dan alasan melakukan penyadapan.

Dalam hal penyadapan dalam kasus perkara korupsi, ada beberapa mekanisme pemberian izin penyadapan yaitu:

Kasus korupsi di Indonesia terus menjadi sorotan di karenakan pelakunya tidaklah jauh yaitu pejabat-pejabat negara yang memiliki posisi paling penting di pemerintahan. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang merugikan perekonomian negara secara langsung maupun tidak langsung sebagai perbuatan yang dipandang bertentangan dengan keadilan, dan nilai-nilai didalam masyarakat.

Alat bukti voice recording sangat didukung pada pasal 5 ayat (1) UU ITE yaitu sifat pembuktiannya untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya maka dari itu alat bukti sangatlah berperan penting untuk proses pembuktian dan pemeriksaan di depan persidangan agar dapat memutuskan bahwa perbuatan tersebut siapakah pelakunya, dan benar atau tidaknya terjadi suatu perbuatan tindak pidana tersebut.

Rekaman suara sebagai alat bukti dasar hukumnya belum diatur didalam KUHAP, tetapi berdasarkan perkembangan teknologi kemudian diatur tentang kedudukan voice recording mengenai alat bukti yang sah didalam Pasal 26A huruf b UU No. 20 tahun 2001 tentang TIPIKOR dan didalam Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE bahwa alat bukti rekaman suara merupakan bukti sah masuk kriteria bukti petunjuk sebagai mana diatur didalam KUHAP. Akan tetapi belum diatur secara jelas dan tegas mengenai

kriteria dan syarat rekaman suara yang sah dijadikan alat bukti. (template) penulisan ini dibuat untuk memudahkan penulis dalam memahami dan mengikuti pedoman penulisan. Template ini persis sebagaimana format yang diharapkan oleh tim penyunting. Untuk menggunakan template ini, cukup di- "Save As" file MS Word ini, kemudian paste artikel anda di sini. Untuk melakukan copy dan paste artikel ke template ini, gunakan "Special Paste" dan pilih "Unformatted Text".

Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang terbit tiap bulan dari Januari-Desember. FHJTM menjadi sarana publikasi artikel penelitian orisinal atau artikel analisis yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum yang mencakup bidang Ilmu Hukum. Bahasa yang digunakan dalam jurnal ini adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Di bagian paragraf akhir ini, penulis diharuskan menuliskan perumusan masalah dan tujuan penulisan terhadap permasalahan yang dikaji.

## **2. Metode**

Metode penelitian normative analisis kualitatif mengumpulkan data-data yang ada. Sifat Penelitian, Deskriptif Analisis: penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berkaitan dengan isu hukum yang di angkat. Tipe Penelitian: kecabaran hukum atas peraturan perundang-undangan yang mengatur.

## **3. Rekaman Suara yang Dapat Dijadikan Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.**

Pengertian korupsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau menyalahgunakan keuang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) agar menguntungkan untuk pribadi atau orang lain-lainnya.

Pengertian korupsi ialah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Korupsi ialah segala tindakan yang mana diancam dengan hukuman seperti halnya telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alat bukti sah diatur juga didalam Undang-undang TIPIKOR pasal 26A pada huruf (a) dan (b).

Dua alat bukti Pasal 26A diatas untuk dijadikan sebagai petunjuk. Artinya mempunyai kedudukan atau fungsi dengan KUHAP. Mengenai rekaman suara tentu ada kriteria yang dapat dipenuhi agar bisa menjadikan alat bukti elektronik tersebut. Rekaman yang boleh di jadikan bukti hanya yang dilakukan oleh KPK, kepolisian, kejaksaan dan/atau instansi hukum yang dapat dijadikan alat bukti berdasarkan peraturan UU yang berlaku. Sementara yang didapatkan orang/individu biasa hanyalah di jadikan bukti pemula untuk diadakanya penyidikan lebih lanjut.

Kriteria harus dipenuhi agar dapat menjadi alat bukti elektronik tersebut hanya diperoleh dari KPK, kepolisian, kejaksaan dan/atau instansi hukum lainnya. Sedangkan

rekaman dari orang biasa hanya dijadikan bukti permulaan saja untuk mengusut apakah benar adanya tindak pidana.

#### 4. Penutup

##### 1. Kesimpulan

Hasil dari penelitian di atas disimpulkan menjadi :

- 1) Kriteria yang harus terpenuhi agar rekaman suara dapat dijadikan alat bukti elektronik yaitu harus di dapatkan secara legal seperti yang sudah di tentukan oleh Undang-undang. Kriterianya yaitu hanya rekaman yang dilakukan oleh KPK dan/atau instansi penegak hukum lainnya saja, kemudian rekaman yang didapatkan oleh orang/individu biasa hanyalah digunakan sebagai bukti petunjuk untuk diadakanya penyelidikan lebuah lanjut mengenai rekaman tersebut.

##### 2. Saran

Saran penulis terhadap hasil analisis penelitian skripsi yaitu :

- 1) Untuk kegiatan perekaman harus memperhatikan norma atau Undang-undang yang berlaku, karena tidak semua hasil rekaman suara dapat dijadikan alat bukti. Bisa saja seseorang yang seenaknya melakukan perekaman tanpa izin dapat dipidanakan.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers
- Erliyani Rahmida. 2020. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama
- Marpaung Leden. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan). Jakarta : Sinar Grafika
- Nurdjana IGM. 2010. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Syamsuddin Aziz, 2011. Tindak Pidana Khusus. Jakarta : Sinar Grafika

##### Internet

- Bambang Pratama. *Penyadapan dan Kedudukannya Sebagai Alat Bukti Elektronik*. 2020. <https://business-law.binus.ac.id/2020/05/03/penyadapan-dan-kedudukannya-sebagai-alat-bukti-elektronik/>. Diakses pada tanggal 16 September 2021.
- Hukum Online. *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi*. 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2020
- Hukum Online.com, *Alat Bukti Rekaman*. 2009.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6915/alat-bukti-rekaman>. Tanggal 22.  
Diakses pada tanggal 16 Maret 2020.

Kpk. *Tindak Pidana Korupsi*. 2019.

<http://acch.kpk.go.id/images/spak/files/games/07-Buku-kunci-jawaban-Arisan.pdf>.

Diakses pada tanggal 23 Agustus 2021.

Om.makplus. *Definisi dan Pengertian Penyidikan serta Proses Penyidikan*. 2015.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Putri Ayu Trisnawati. *Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia*. 2020. <https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021.

Rinaganawan. *Apa yang dimaksud dengan alat bukti didalam KUHP*. 2018. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-alat-bukti-didalam-kuhap/32812>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

### **Jurnal**

Syuraida, Hikmatius. *Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi*. 2015. Artikel dalam Jurnal “Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah”. No. 2. Vol. 3, hlm. 230.

Dimas Tomy Purwosasonoko. “*Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara dalam Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. 2015. *Skripsi*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 6.t.d.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 20016 tentang Infotmasi dan Transaksi Elektronik